

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI MASYARAKAT  
(STUDI KASUS DESA SABBANG PARU KECAMATAN  
LEMBANG KABUPATEN PINRANG)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna memperoleh gelar sarjana  
Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh :**

**Mahadir**

**10538305714**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Mahadir**, NIM 10538 3057 14 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014 Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudinum pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019.

25 Jumadil Awal 1440 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
31 Januari 2019 M

**PANITIA UJIAN**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. M. Abd. Rahmat Rahum, S.Pd., M.Pd., M.M.  
Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
Sekretaris : Dr. Bahamillah, M.Pd.  
Penguji

1. Kholiluddin, N.20, Ph.D.
2. Juchaidin, Hafid, S.Pd., M.Pd.
3. Sam'un Nurhanna, S.Pd., M.Pd.
4. Lutfan Ismail, S.Pd., M.Pd.

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top right: *Handwritten signature*  
- Middle right: *Handwritten signature*  
- Bottom right: *Handwritten signature*

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

*Handwritten signature of Erwin Akib*  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

*Handwritten signature of Drs. H. Nurdin*  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)

Nama : Mahadir

NIM : 10538 3057 14

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa, surat skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di hadapan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

25 Jumadil Awal 1440 H

Makassar

31 Januari 2019 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Svahribun K, M.Pd.

Risfaisel, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Drs. H. Nurdion, M.Pd.  
NBM: 575 474

**MOTTO :**

*“Semakin banyak yang kau berikan maka semakin banyak pula yang akan kau dapatkan” (Penulis)*

*“Menyepi itu penting supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian” (Emha Ainun Nadjib)*

Karya ini persembahkan terindah buat :

❖ Kedua orang tuaku, Bapak Muh. Thamrin dan Ibu Muliana

Tulisan ini merupakan representasi cinta kasihku yang amat besar kepada kalian berdua.

## ABSTRAK

**Mahadir 2018, Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Syahribulan K dan Risfaisal.**

Alokasi dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan alokasi dana desa juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil pemanfaatan alokasi dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Sabbang Paru kurang efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah terealisasi kurang tepat sasaran karena mengabaikan aspek pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Sabbang Paru masih kurang, dimana masyarakat belum terlalu aktif dalam merencanakan pembangunan di desa.

***Kata Kunci : Efektivitas, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi penulis yaitu “*Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat*”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan mendapatkan gelar sarjana. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan sehari-hari dalam bertindak.

Ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya . penulis ucapkan untuk orang tercinta dalam hidup ini tiada lain adalah kedua orang tua penulis yaitu Bapak Muh. Thamrin dan Ibu Muliana, yang telah mendidik, merawat, dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak dapat penulis sampaikan hanya dalam beberapa lembaran kertas, dari kecil sampai saat ini hingga penulis bisa menapaki jenjang pendidikan yang lebih layak. Terima kasih pula kepada kakak Akhmad Afandi, terima kasih untuk setiap perjuangan dan juga do'anya,. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan rasa terima kasih kepada, bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Erwin Akib, S.Pd, M.Pd, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan beserta para staf dan jajarannya. Bapak Drs. H. Nurdin, M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Drs. H. Muhammad Syukur Hak, MM. selaku penasehat akademik selama kurang lebih 4 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini. Ibu Dra. Hj. Syahribulan K, M.Pd selaku pembimbing I dan Risfaisal, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini. Para Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih empat tahun perkuliahan.

Seluruh Staff Prodi Pendidikan Sosiologi serta staff di lingkup FKIP Unismuh Makassar tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini. Bapak Kepala Desa Sabbang Paru dan juga Para Pegawai di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu penulis untuk memberikan kelengkapan data yang diperlukan penulis. Masyarakat Desa Sabbang Paru yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis. Manusia yang pernah mengklaim dirinya bahwa kita adalah saudara tak sedarah yang

masih setia sampai sekarang terima kasih atas segala cerita dan pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan. Kakanda Andi Erid Prayitno S.Pd, Fhajar Ken S.Pd, Irsan S.Pd, Andi Asrul AM S.Pd, dan masih banyak lagi kakanda yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, terimah kasih atas segala hal yang telah kalian berikan selama ini yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Terima kasih kepada teman seperjuangan SOS E 14 yang senantiasa menemani penulis selama melaksanakan studi, dan teman-teman Dialektika 14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari pembaca yang sehat dan membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memenuhi kriteria dalam kelulusan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 21 Oktober 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KARTU KONTROL PEMBIMBING I .....</b>	<b>iv</b>
<b>KARTU KONTROL PEMBIMBING II.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERJANJIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional.....	11
<b>BAB. II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. KajianPustaka.....	14
1. Penelitian Relevan.....	14

2. Efektivitas .....	17
3. Desa.....	20
4. Alokasi Dana Desa.....	22
5. Pemberdayaan Masyarakat.....	25
6. Teori Ketergantungan Kekuasaan .....	27
7. Teori Pembangunan Terpusat pada Manusia .....	29
B. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB. III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokus Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Fokus Penelitian .....	39
E. Instrument Penelitian .....	39
F. Jenis dan Sumber Data .....	40
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
H. Tehnik Analisis Data.....	41
I. Tehnik Keabsahan Data .....	42
<b>BAB. IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Desa Sabbang Paru.....	46
B. Sejarah Desa Sabbang Paru.....	46
C. Letak dan Kondisi Geografis .....	49
D. Keadaan Demografi .....	50
E. Ikon Kota Pinrang .....	54
<b>BAB. V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang .....	63

B. Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.....	83
<b>BAB. VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sabbang Paru .....	51
Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sabbang Paru .....	53
Tabel 5.1 Tahapan Perencanaan ADD Kegiatan Musrembang .....	65
Tabel 5.2 Pengalokasian Anggaran ADD Tahun 2018.....	71

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konsep .....	33
Gambar 4.1 Masjid Agung Al-Munawwir Pinrang.....	56
Gambar 4.2 Air Terjun Karawa .....	58
Gambar 4.3 Bendungan Benteng .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengembangan sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung itu.

Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Hal yang ingin dicegah adalah bahwa bangsa Indonesia hanyut tanpa kendali dalam arus globalisasi itu dan tenggelam didalamnya, dan bahwa proses globalisasi akan berwujud proses dehumanisasi.

Pada waktu yang bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan, mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang

meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata.

Kelancaran pembangunan nasional diawali dari pembangunan ditingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa. Namun pada pelaksanaan pembangunan nasional masih ada beberapa masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota di Indonesia.

Tidak meratanya pembangunan akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Namun dengan adanya pemberian otonomi daerah yang seluas luasnya memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi

penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa.

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar

masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif.

Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Salah satu sumber pendapatan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman

Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa.

Untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) salah satunya mengatur tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat desa sering menjadi tidak berkelanjutan.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus

bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kebijakannya sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya.

Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang

cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Pinrang, yaitu Kabupaten yang berada di ujung Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten yang terdiri dari dua belas kecamatan ini dan memiliki jumlah desa yang lumayan banyak yaitu berjumlah seratus delapan desa masih banyak mengalami kendala dalam melakukan pembangunan khususnya di tingkat pedesaan.

Hal itu di akibatkan oleh kurangnya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Namun sejalan dengan berbagai kendala yang di hadapi khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan mengembangkan potensi yang ada di desa maka Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang meluncurkan program Bursa Inovasi Desa.

Seperti di kutip dalam Sahabat News Online yang terbit pada tanggal 28 Desember 2017 bahwa program Bursa Inovasi Desa bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan program pengembangan Desa yang lebih baik serta mengajak Kepala Desa untuk menggunakan dan memanfaatkan APBDes dengan semaksimal mungkin dan berkomitmen menjalankan programnya. Pemerintah Kabupaten juga mencanggangkan akan menggelar Desa Award tahun 2018 yaitu memberikan penghargaan kepada desa yang melakukan inovasi dan memenuhi standar sebagai Desa Inovasi yang telah ditentukan oleh Kementerian.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas yang melatarbelakangi sehingga penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Diharapkan keseluruhan Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa.

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan sejauh mana efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maka judul penelitian ini yaitu **“Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini. Rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam mengembangkan potensi masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam mengembangkan potensi masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam mengembangkan potensi masyarakat di desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam mengembangkan potensi masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis.

Sebagai pembandingan antara teori yang ada dibangku perkuliahan dan fakta yang ada di lapangan dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis.

- a. Bagi penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktis.

- b. Sebagai referensi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah yang perlu penulis jelaskan dalam karya ilmiah ini, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca, berikut ini adalah beberapa istilah yang berkenaan dengan pembahasan didalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Efektivitas

Efektifitas adalah sebuah kosa kata Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris *Efective*. Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan: “Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan”.

Dalam tulisan ini penulis memberi kesimpulan bahwa arti efektifitas adalah hasil kerja yang baik dan dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat, khususnya dalam ranah pembangunan desa.

## 2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005).

## 3. Potensi

Potensi adalah suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Intinya, secara sederhana, potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan (Majdi, 2007).

## 4. Pengembangan Masyarakat

Secara singkat, pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Telah disebutkan bahwa konsep dari komunitas adalah sekelompok orang

dengan identitas bersama. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat bergantung pada interaksi antara manusia dan aksi bersama daripada kegiatan individu apa yang beberapa ahli sosiologi menyebutnya dengan ‘lembaga kolektif’ (Flora dan Flora 1993).

Dalam tulisan ini penulis memberi kesimpulan bahwa pengembangan masyarakat adalah cara yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Penelitian Relevan**

Pengkajian terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti perlu dilakukan, di samping pembahasan teori-teori. Pengkajian atas hasil-hasil penelitian terdahulu akan sangat membantu dalam menelaah masalah yang akan dibahas dengan berbagai pendekatan spesifik. Selain itu juga memberikan pemahaman mengenai posisi peneliti, untuk membedakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu.

Peneliti pertama bernama Dian Novita (2016), dengan penelitian berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas serta efek pengganda pengolahan Dana Desa Kecamatan Leuwiliang Bogor. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif kombinasi, yaitu menganalisis data target, realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas, serta menganalisis data wawancara dengan mengukur pengganda pengeluaran pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi Desa-desa di Kecamatan Leuwiliang sebesar 81%, yang memenuhi kriteria

cukup efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas Desa-desanya di Kecamatan Leuwiliang sebesar 92%, termasuk dalam kategori efektif. Desa Purasari mempunyai Multiplier Effect tertinggi dari sebelas Desa yang lain di Kecamatan Leuwiliang, dengan nilai pengganda sebesar 7,0 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dari Rp.1,46,007 menjadi Rp.10,052,049. Desa Purasari mempunyai program prioritas pembangunan jalan rabat beton dan gorong-gorong.

Selanjutnya peneliti yang kedua bernama Riska Apriiliana (2017), dengan penelitian berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Apriiliana bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, yaitu mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ngombakan kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014), dan di *crosscheck* dengan fenomena riil yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ngombakan dalam mewujudkan *good governance*, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala

tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan.

Peneliti berikutnya adalah yang ketiga bernama Friska Kusuma Wardani (2017), dengan judul penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara”. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yaitu dalam proses perencanaan, mekanisme pencairan dana, pelaksanaan dan penggunaan dana, pengawasan, pelaporan serta pertanggungjawaban apakah sudah sesuai pada prosedur yang berlaku, peran Alokasi Dana Desa dalam pembangunan pedesaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan dapat mendeskripsikan atau memberi gambaran pada objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai narasumber atau informan. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberrejo sudah cukup baik, meskipun dalam pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terjadi keterlambatan. Dalam pengelolaan ADD partisipasi masyarakat cukup baik, sehingga

pengalokasian dana ADD tepat sasaran. Alokasi Dana Desa juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan di Desa Sumberrejo, dimana pembangunan dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa, antara lain sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, budaya gotong-royong, besaran Alokasi Dana Desa, serta kebijakan pemerintah.

## **2. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Bahasa Inggris *effectiveness* yang telah mengintervensi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasilguna.

Sedangkan dalam Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16)

yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Abdul Halim dalam I Waayan Saputra (2016), efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

Dilihat dari pendapat tersebut peneliti dapat menunjukkan bahwa, efektivitas adalah suatu ukuran sampai sejauh mana organisasi pemerintah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan menggunakan prosedur atau aturan yang ada. Apabila hal ini dikaitkan dengan masalah keuangan maka sampai sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan.

Konsep efektivitas dapat didekati dari dua segi, yaitu tujuan dan teori sistem. Pendekatan tujuan memandang bahwa organisasi itu dibentuk dengan suatu tujuan dan oleh karena itu orang-orang di dalamnya berusaha secara rasional agar tujuan tercapai, dengan demikian, efektivitas diartikan sebagai pencapaian yang telah disepakati bersama.

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson dalam Sulastri Nova (2016)

mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antarproduksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Dari uraian pendapat diatas penulis memberi interpretasi mengenai efektifitas sebagai unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2004), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka efektivitas dapat disimpulkan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

### **3. Desa**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah

desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun. Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari sedangkan di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Pinrang dikenal dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Sunardjo (dalam Wasistiono 2006:9) pengertian Desa yaitu, “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Berdasarkan pengertian Desa diatas maka penulis berkesimpulan bahwa faktor yang membedakan antara Kota dengan Desa adalah budaya gotong royongnya. Di Desa gotong royong sudah menjadi aktifitas

keseharian masyarakat hal ini di sebabkan oleh ikatan lahir batin di antara masyarakat desa yang sangat kuat.

Desa bisa dibagi kedalam 3 kelompok jika dilihat dari tingkat klasifikasi aktivitasnya, yaitu, a.) **Desa agraris:** Desa agraris tentu berisikan mereka yang bekerja dengan pencaharian utama sebagai petani atau pemilik dan pengelola kebun. Terutama sejak dulu, Indonesia terkenal akan Negara agraris atau pertanian dengan lahan yang sangat luas. Maka menemukan desa agraris di Indonesia bukanlah hal sulit. Sumber pendapatan utama desa ini juga pasti dengan menjual hasil ladang dan juga sawah yang dikonsumsi banyak orang, desa yang paling terkenal atau daerah agraris yakni seperti Indramayu atau Subang. b.) **Desa Industri:** Desa industri merupakan desa yang mata pencaharian utamanya adalah penduduk yang bekerja di bidang industri baik berukuran kecil maupun besar. Desa industri sudah tidak lagi sulit ditemukan terutama di jaman modern seperti ini. Seperti daerah yang menghasilkan barang lokal berkualitas dan juga desa yang bisa menghasilkan usaha dan menjadikannya sebagai potensi mendapatkan pendapatan utama. Contohnya seperti desa penghasil sandal cibaduyut di Bandung, atau desa yang menjual telur asin di Brebes. c.) **Desa Nelayan:** Dengan kondisi geografis yang tidak sepenuhnya daratan, nelayan merupakan mata pencaharian yang sangat wajar ada di Indonesia. Desa nelayan merupakan desa ketiga yang termasuk klasifikasi desa menurut aktivitasnya. Selain mata pencaharian utamanya yang bekerja sebagai nelayan dan peternak

ikan atau tambak, desa ini juga biasanya menghasilkan bahan utama dari hasil laut seperti ikan dan juga hasil laut seperti mutiara. Sehingga laut menjadi tempat utama mereka untuk bertahan hidup.

#### **4. Alokasi Dana Desa**

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti, setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya.

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut: a.) Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b.) Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. c.) Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

## **5. Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan), karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan senantiasa tercipta dan hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan program aksi diarahkan kepada muara yang relatif sama, yakni membuat sasaran atau masyarakat memiliki kemampuan “daya” agar masyarakat sasaran terangkat dari keterpurukannya. Dalam konsep aslinya, pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada nuansa agar masyarakat sasaran dapat diposisikan terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Kerangka berpikir dalam proses pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting, yaitu: a.) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang b.) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan c.) Upaya melindungi (*protect*) terjadinya

persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Pemberdayaan dengan menekankan kepada ketiga ketentuan tersebut diyakini merupakan strategi jitu dalam menekan angka kemiskinan (Jamasy, 2004).

Menurut (Widjaja, 2003) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

(Abu Huraerah, 2008) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

## **6. Teori Ketergantungan Kekuasaan**

Kekuasaan merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan dari Nicollo Machiavelli ( *The Prince* , awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes ( *Leviathan* abad, pertengahan-17). Tujuan dari

kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997).

Lebih lanjut (Abbot, 1996:16-17) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan, dimana teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Menurut Abbot (1996: 20) dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan. yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan.

Sebagai contoh : Teori “ketergantungan-kekuasaan” (power-dependency) mengatakan kepada kita bahwa pemberi dana (donor) memperoleh kekuasaan dengan memberikan uang dan barang kepada masyarakat yang tidak dapat membalasnya. Hal ini memberikan ide bahwa lembaga/organisasi (non profit organization) /LSM sebaiknya tidak

menerima dana dari hanya satu donor jika ingin merdeka/bebas. Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang/modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya/ kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan/ modal yang kuat. Selain uang/modal, maka ilmu pengetahuan/ knowledge dan aspek people/sekumpulan orang/ massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut mempunyai power. Kelompok yang memiliki *power* maka kelompok itu akan berdaya.

Dalam hal pengembangan potensi masyarakat desa maka Alokasi Dana Desa (ADD) dapat menjadi *power* dalam hal membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat desa dapat menjadi masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhannya maupun dalam menemukan solusi dalam setiap permasalahan kesehariannya.

## **7. Teori Pembangunan Terpusat Pada Manusia**

Teori-teori yang muncul dari pemikiran ini melihat secara tajam bagaimana pembangunan yang dipraktekkan tidak berpihak pada manusia, yang seyogyanya diletakkan pada posisi subjek terhadap pembangunan, bukan diletakkan sebagai objek yang selama ini dilakukan oleh Negara penganut modernisasi, seperti kebanyakan Negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia di masa Orde Baru.

Kegagalan teori pembangunan modernisasi telah menyadarkan banyak pihak kepentingan terhadap pembangunan agar “mengutamakan manusia” dalam proyek-proyek pembangunan. Ini berarti memberikan manusia lebih banyak peluang untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan pembangunan sehingga manusia menjadi subjek yang aktif dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembangunan (Damsar, 2016: 215).

Terkait dengan pengertian diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa ini juga bermakna apapun kebijakan atau program pembangunan harus mengutamakan manusianya ketimbang lainnya. Makna tersirat didalamnya adalah apapun bentuk kerusakan, penyelewengan, kegagalan, kerusuhan, dan sebagainya berpangkal pada mengabaikan manusia dalam perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan program.

Teori pembangunan terpusat pada manusia memiliki bermacamvarian teori pembangunan aplikatif seperti teori “mengutamakan manusia dalam pembangunan” dari Cernea dkk., teori pembangunan perdesaan mulai dari belakang yang muncul dari pemikiran Robert Chambers dengan pendekatan PRA-nya, dan teori pemberdayaan masyarakat.

Inti dari kesemua teori tersebut adalah bagaimana manusia diposisikan sebagai aktor sosial yang aktif dalam peran sertanya pada berbagai proses pembangunan. Dalam teori-teori tersebut partisipasi merupakan kata kunci dalam proses pembangunan (Damsar, 2016).

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “*part*” yang berarti bagian. Jika kata “*part*” dikembangkan menjadi kata kerja maka kata ini menjadi “*to participate*”, yang bermakna turut ambil bagian (Damsar, 2016).

Sehubungan dengan pengertian di atas partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun non-politik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga. Dalam berbagai kegiatan pembangunan fasilitas publik seperti irigasi, jalan desa, atau kebersihan lingkungan desa dilakukan secara bersama di antara sesama warga desa. Kegiatan-kegiatan seperti ini dimengerti sebagai partisipasi.

Diana Conyers (1994), dalam bukunya *perencanaan sosial dunia ketiga*, Conyers memaparkan tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pertama, partisipasi masyarakat dilihat sebagai suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal.

Kedua, masyarakat akan lebih memercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam persiapan dan perencanannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga,

munculnya anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Dari uraian penjelasan mengenai partisipasi dan pentingnya partisipasi maka peneliti menarik kesimpulan bahwa mengabaikan aspek partisipatif dalam pembangunan dengan dimensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan *monitoring* akan menyebabkan manusia diposisikan sebagai objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki manusia, baik sebagai individu maupun kelompok diabaikan. Aspek inilah yang akan dipulihkan melalui pemberdayaan masyarakat.

## **B. Kerangka Pikir**

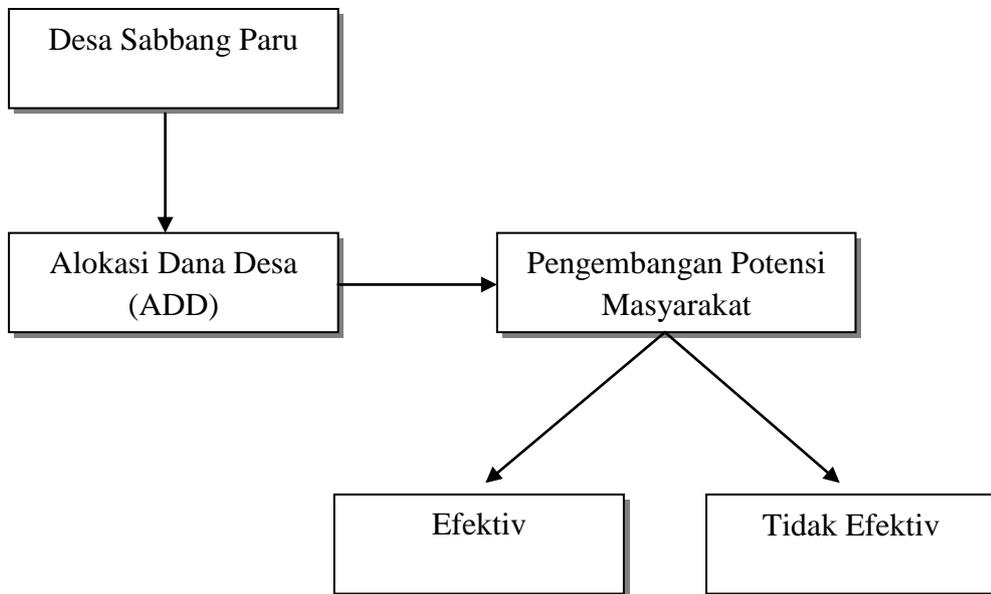
Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun lemahnya akses yang dimiliki masyarakat di tingkatan lokal (khususnya di tingkatan desa) menjadi penyebab terhambatnya masyarakat desa untuk mengembangkan potensi hidupnya.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari ADD diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu ADD ini ditujukan pula supaya dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

Namun sejalan dengan pemanfaatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini masih terdapat ketimpangan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam mengembangkan potensi masyarakat maka di gambarkan kerangka pikir sebagai berikut :



1. Gambar kerangka pikir penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, (2012) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Andi Prastowo, (2011) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Skripsi ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya. Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya secara ilmiah. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif tidak mengandalakan bukti berdasarkan logika sistematis, prinsip angka atau metode statistik pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif. Seperti halnya yang disebutkan oleh Lexy J. Moleong, dalam Ade Sujastiawan (2018) menjelaskan mengenai penelitian kualitatif: Penelitian kualitatif lebih banyak menekankan pada segi “proses” daripada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan–hubungan bagian yang sedang di teliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Dengan penelitian kualitatif menghendaki di tetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

## **B. Lokus Penelitian**

Penelitian ini, secara geografis terletak di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sabbang Paru Kecamatan

Lembang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mengembangkan potensi masyarakat pedesaan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sabbang Paru.

### **C. Informan Penelitian**

Dalam pengambilan data digunakan teknik *Purpose Sampling*, dimana teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya adalah orang tersebut dianggap orang yang terkait dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut menjadi penguasa sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti dan mengspesifikasikan kriteria berdasarkan apa yang ditetapkan oleh peneliti.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive Sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

<b>Informan Kunci</b>			
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>
1	Darwin	56	Kepala Desa
2	Hariato	36	Sekretaris Desa
3	Muliati	39	Bendahara Desa
<b>Informan Biasa</b>			
4	Muh. Jafar	71	Petani
5	Usman	27	<i>Security</i>
6	Ambo Sia	74	Petani
7	Bapak Sarina	57	Nelayan
8	Ahmad Afandi	27	Tidak Ada
9	Sunni	38	Ibu Rumah Tangga
10	Sualiman	39	Nelayan
11	Muh. Ali	32	Tukang Las
<b>Informan Tambahan</b>			
12	Sapri Cindopang	28	Tukang Las
13	Baco	52	Petani
14	Sultani	54	Petani
15	Siang	40	Ibu Rumah Tangga
16	Suardi	43	Kepala Dusun

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

#### **D. Fokus Penelitian**

Menurut Moleong Ade Sujastiawan (2018), tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus penelitian yang diteliti. Adanya fokus penelitian membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penelitian yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau subjek penelitian menjadi lebih terarah, kemudian penentuan fokus penelitian akan menetapkan kriteri-kriteria untuk menjaring informasi yang diperoleh.

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti mengenai efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pengembangan potensi masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Untuk memperoleh data penelitian ini, maka digunakan instrument penelitian. Instrumen penelitian tersebut berupa lembar observasi, panduan wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Lembar observasi, berisi catatan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung dilapangan.
2. Paduan wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah

pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh para informan pada saat proses wawancara.

3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data-data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **F. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer.

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada instrument yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

2. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan mengumpulkan sejumlah dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Wawancara, merupakan proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial, dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka peneliti dapat menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada responden secara lisan dengan menggunakan panduan instrument untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti.
  2. Observasi, merupakan teknik penelitian dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti.
  3. Dokumentasi, merupakan proses pembuktian data yang didasarkan pada jenis apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, ataupun gambaran. Teknik dokumentasi merupakan teknik pelengkap penelitian.
- Klasifikasi teknik pengumpulan data.

## **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Mile dan Huberman dalam Yanuar Ikbal (2012). Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data tersebut, yaitu:

### *1. Reduction Data*

*Reduction Data* atau reduksi data, adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari data dan

polanya serta membuang data yang tidak dibutuhkan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

## 2. *Display data*

*Display data* atau penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. *Conclusion Data*

*Conclusion Data* atau memverifikasi data, dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan tentang data penelitian serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada sejak awal.

# I. **Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompokanya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisanya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu, maka akan ditambah waktu satu minggu lagi. Dan jika dalam penelitian ini, data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data. Bila setelah diteliti kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

### 2. Meningkatkan Ketekunan

Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah / enteng data dan informasi.

### 3. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau istilah lain dikenal dengan *trustworthiness*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan.

a. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data tersebut.

b. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

c. Trianggulasi Peneliti

Trianggulasi peneliti adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang peneliti dengan peneliti lainnya (peneliti yang berbeda) tidak lain untuk mengecek kembali tingkat kepercayaan data, dengan begitu akan memberi kemungkinan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akan lebih dipercayai.

d. Trianggulasi Waktu

Trianggulasi waktu adalah pengujian data yang telah dikumpulkan dengan memverifikasi kembali data melalui informan yang sama pada waktu yang berbeda.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sabbang Paru**

Desa Sabbang Paru terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Pada awalnya Desa Sabbang Paru adalah bagian dari Desa Binanga Karaeng yang pada saat itu berstatus Rukun Kampung (RK), Desa Sabbang Paru merupakan wilayah dataran rendah, wilayah perbukitan, dan wilayah dataran tinggi/pengunungan. Jumlah penduduk Desa Sabbang Paru yaitu laki-laki 2447 jiwa dan perempuan sebanyak 2501 jiwa dengan jumlah rumah tangga 928 rumah tangga.

#### **B. Sejarah Desa Sabbang Paru**

Munculnya Nama “Sabbang Paru“ Ada dua pendapat dari Tokoh Masyarakat terdahulu:

##### **1. Pendapat Pertama**

Nama Sabbang Paru yang kita kenal sekarang ini adalah berasal dari bahasa bugis yaitu “ **SABBANG BARU** “ yang berarti Padang yang luas yang baru di temukan yang terletak di sebelah utara muara sungai maroneng oleh pemerintah Keturunan Bangsawan dari Kerajaan Bone, Kerajaan Gowa, Kerajaan Wajo.

Dalam perkembangannya di pengaruhi Intonasi dan dialek Bahasa Bugis dan merujuk pada salah satu bentuk Kuburan yang berbentuk Ko'bang, Kuburan orang yang mendiami padang tersebut sebelum

Bangsawan – bangsawan itu datang sehingga menjadi “SABBANG PARU” yang pada waktu itu merupakan daerah Lili ( Daerah Binaan ) Galang – galang Desa Binanga Karaeng pada saat ini. Sejarahpun terus berotasi dan Sistem dan tata Pemerintahan juga terus mengalami Perubahan sehingga Wilayah Sabbang Paru (Dusun kajuangin) yang merupakan Daerah Lili Galang-galang berubah status menjadi bagian Wilayah Kelurahan Tadokkong.

## 2. Pendapat Kedua

Nama Sabbang Paru yang kita kenal sekarang ini adalah berasal dari nama sebuah daerah (Kampung ) yang ada di Wilayah Kabupaten Wajo Sekarang yakni Kampung Sabbang Paru yang berada di sebelah selatan Kota Sengkang yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Sabbang Paru.

Konon ceritanya pada Zaman Kerajaan dulu sebelum Belanda masuk ke Indonesia, Sul-Sel sekitar tahun seribu Empat ratusan lebih, Seorang keturunan Kerajaan Wajo yang mengasingkan diri dari keluarga Kerajaan dan membawa *Jowa'* atau *Sura Dau* (bahasa Bugis) yang berarti Pengawal Peribadi atau pengikut setia, membentuk satu Rombongan yang berjumlah sekitar Empat puluh sampai Seratus Orang.

Rombongan ini berjalan ke arah *Labureng kesso* (bahasa Bugis) yang berarti ke Arah Barat menelusuri dan melewati beberapa Hutan, Bukit, dan Sungai akhirnya sampailah disuatu Padang Rumput yang luas di dekat muara Sungai Maroneng, ditempat itulah rombongan ini

*Maddakka'* (bahasa Bugis) yang artinya Istirahat, dan melakukan kegiatan pertanian (bercocok Tanam),serta membuat Pemukiman/Perkampungan. Karena suburnya wilayah itu mereka berhasil panen dengan sangat memuaskan akhirnya rombongan ini betah tinggal disitu dan Kampung ini diberilah nama Kampung Sabbang Paru sesuai dengan nama Kampung asalnya.

Karena kesetiaan dan kejujurannya serta keberanian dan kearifan yang dimiliki untuk memimpin warganya, akhirnya kampung ini dikenal kesegala penjuru dan membentuk Pemerintahan tersendiri dengan Sistem Kerajaan. Puncak kejayaannya ketika Kerajaan ini berhasil menundukkan Kerajaan - Kerajaan yang ada disekitarnya dan kembali bergabung atau bernaung dibawah Pemerintahan Kerajaan Wajo.

Salah satu bukti peninggalannya yaitu adanya Kuburan Raja-raja atau Bangsawan disamping *Kubah Langkara* (Langkara yaitu tempat Shalat Orang orang Bangsawan atau keluarga Raja) yaitu tempat Imam yang dikenal orang sekarang dengan nama *Ko'bbang* yang terletak diujung selatan Desa Sabbang Paru..

Akhirnya kerajaan ini jatuh dan terlepas dari Pemerintahan Kerajaan Wajo, ketika Belanda masuk dan mengadu domba dengan Kerajaan - kerajaan yang ada, dan masyarakatnya terpecah sebagian bergeser kearah utara membentuk perkampungan yakni Kajuangin dan Kanipang pada waktu itu daerah ini menjadi daerah *Lili* ( Daerah Binaan ) Galang – galang Desa Binanga Karaeng pada saat ini. Seiring perjalanan

zaman yang terus mengalami suatu perubahan dan akhirnya pada tahun 1992 Sabbang Paru di persiapkan menjadi sebuah Desa yang wilayahnya Dusun kajuangin, dan sebagian wilayah Desa Binanga karaeng yaitu Dusun kanipang. dan pada tahun 1994 menjadi Desa Defenitif yang kita kenal sekarang ini “DESA SABBANG PARU“ sekaligus Pelantikan Kepala Desa Sabbang Paru yang pertama H. Paturusi oleh Bupati Pinrang H. A. Firdaus Amirullah.

Desa Sabbang Paru adalah salah satu Desa dari 16 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya dari Ibukota Kabupaten Pinrang sekitar 45 KM dan sekitar 2 KM dari jarak Ibukota kecamatan Lembang. Yang memiliki Dua dusun yaitu : Dusun Kajuangin terdiri dari Empat RK dan Dusun Kanipang terdiri dari Dua RK. Adapun nama – nama Kepala Desa sabbang Paru adalah : H. Paturusi (Periode 1994 – 2004), Darwin (Periode 2004 – 2009) Syarifuddin Paturusi, SE (Periode 2009 - 2015) Harianto (Periode 2015) Darwin (Periode2015-hingga sekarang).

### **C. Letak dan Kondisi Geografis**

Batas-batas Desa Sabbang Paru :

Sebelah Utara : Kelurahan Binanga Karaeng

Sebelah Timur : Kelurahan Todokkong

Sebelah Selatan : Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua

Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara umum keadaan topografi Desa Sabbang Paru adalah daerah perbukitan di sebagian wilayah Dusun kanipang. Dan sebagian besar Luas Wilayahnya dataran rendah (Pantai). Desa Sabbang Paru memiliki iklim tropis dan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sebagian besar masyarakat Desa Sabbang Paru menggunakan sumur gali, untuk kebutuhan air bersih dan keperluan hidup sehari-hari.

#### 1. Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Sabbang Paru adalah daerah perbukitan di sebagian wilayah Dusun kanipang. Dan sebagian besar Luas Wilayahnya dataran rendah ( Pantai ) di Dusun Kajuanging.

#### 2. Iklim dan Musim

Desa Sabbang Paru memiliki iklim tropis dan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

#### 3. Hidrologi

Sebagian besar masyarakat Desa Sabbang Paru menggunakan sumur gali, untuk kebutuhan air bersih dan keperluan hidup sehari-hari.

### **D. Keadaan Demografi**

Berdasarkan data Sensus penduduk tahun 2017 maka jumlah penduduk Desa Sabbang Paru adalah sebagai berikut :

#### 1. Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, adalah sebagai berikut:

#### 4.1 Tabel jumlah penduduk desa sabbang paru tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-Laki	1.942
Perempuan	1.998
Jumlah	3.940

Dari tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sabbang Paru pada tahun 2018 sebanyak 3.940 jiwa dengan jumlah rumah tangga 895 rumah tangga. Data ini diperoleh dari profil desa Sabbang paru tahun 2018.

#### 2. Sarana Pendidikan Masyarakat

Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa Sabbang Paru baik yang terdapat di dalam wilayah kelurahan maupun di luar desa adalah sebagai berikut:

##### a) Taman Kanak-kanak

Saat ini di Desa Sabbang Paru sudah terdapat Taman bermain kanak– kanak yakni TK yang terdapat di dusun Kajuangin.

##### b) Sekolah Dasar

Di Desa Sabbang Paru khususnya Dusun kajuangin terdapat 2 buah Sekolah Dasar yaitu SDN N0. 142 Kajuangin dan MI DDI Kajuangin. Berhubungan dengan lokasi berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, sehingga anak- anak usia sekolah di Dusun kajuangin memperoleh akses yang mudah untuk ke sekolah. Sedangkan

di dusun Kanipang hanya ada satu Sekolah Dasar yaitu SDN 185 Kanipang.

### 3. Kondisi Lingkungan Pemukiman

Kondisi pemukiman masyarakat Desa Sabbang Paru Khususnya dusun Kajuangindi berada pada wilayah dataran rendah. Sebagian besar rumah penduduk di dusun Kajuangin berbentuk rumah batu dan rumah panggung yang memiliki halaman. Di sisi lain, kondisi lingkungan masih perlu pembenahan sampah pada tempatnya. Di samping itu, hanya sedikit rumah penduduk yang masih di bawah standar rumah sehat dilihat dari rumah dan kepemilikan jamban keluarga.

Berdasarkan pada bentuk rumahnya perumahan penduduk di Desa Sabbang Paru khususnya dusun kajuangin terdiri atas dua bentuk rumah yang dimukimi oleh masyarakat yakni rumah panggung yang penghuni terdiri atas rumah panggung dan rumah bawah. Rata-rata rumah panggung seluruh bagiannya terbuat dari kayu, dan ada beberapa rumah panggung yang bagian atasnya terbuat dari kayu dan bagian bawahnya terbuat dari bahan semen atau pamanen. Kondisi ini tidak jauh beda dengan pemukiman masyarakat di dusun Kanipang.

Dusun Kajuangin, terdapat 1 unit masjid , 1 unit TK, 1 unit Sekolah Dasar, 1 unit DDI MI, 1 unit Kantor Desa, (*berdasarkan data Observasi langsung lapangan*) dandi dusun Kanipang terdapat SDN 185 Kanipang. Dan 2 unit mesjid sebagai tempat ibadah masyarakat setempat.

#### 4. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi

Kekayaan dan keragaman budaya Desa Sabbang Paru khususnya dusun kajuangin dan Kanipang sebagai suatu rumpun budaya hanya terdiri dari Bugis Patinjo, Rumpun Bugis Patinjo mewarnai seluruh aktifitas masyarakat yang ada di Dusun Kajuangin dan Dusun Kanipang.

Sumber perekonomian utama bagi masyarakat Kajuangin dan Dusun Kanipang adalah bidang pertanian/perkebunan, Nelayan/Perikanan, peternak, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Perangkat Desa, Wiraswasta, Honor, Lainnya. sebagian besar hanyalah sekedar memproduksi Gabah/beras, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan penghasilan utamanya masyarakat adalah pekerja serabutan. Peternak sapi masih memiliki keuntungan lebih karena lahan yang di gunakan sangat luas.

4.2 Tabel Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sabbangparu Tahun 2017

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani / Pekebun	1,730 Orang
Nelayan / Perikanan	752 Orang
Pegawai Negeri Sipil ( PNS )	22 Orang
TNI	2 Orang
Polri	4 Orang
Guru	18 Orang
Bidan	4 Orang
Perangkat Desa	6 Orang
Wiraswasta	96 Orang
Honor	43 Orang
Lainnya	204 Orang

## E. Ikon Kota Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polawali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun.

Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "*benrang*" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama **La Dorommeng La Paletange**, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata "*Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa*", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang.

Sumber lain mengatakan pemukiman Pinrang yang dahulu rawa selalu tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas genangan air, dalam bahasa Bugis disebut "Pinra-Pinra

Onroang". Setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: *Pinra-pinra*.

Setiap daerah di Indonesia tidak terlepas dari ciri khas masing-masing daerah tersebut yang membedakannya dengan daerah lain, hal itu sering kita sebut sebagai ikon. Baik itu berupa bangunan, adat istiadat, kesenian, ataupun keindahan alamnya. Begitu juga dengan kota pinrang, ada beberapa ikon yang terkenal di kota pinrang beberapa di antaranya adalah :

#### 1. Masjid Agung Al-Munawwir Pinrang

Masjid Agung Al-Munawwir Pinrang Tampil dengan gaya kontemporer, kombinasi modern dan tradisi tempatan, Masjid Agung Al-Munawwir Kabupaten Pinrang tampil menawan dan kini menjadi salah satu ikon Kabupaten Pinrang. Masjid Agung Al-Munawwir adalah masjid agung yang berada di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid ini merupakan masjid utama di kabupaten tersebut, sesuai dengan fungsinya masjid ini berdiri di tengah tengah kota, bersebelahan dengan Komplek Kantor Bupati Pinrang, kantor DPRD Kabupaten Pinrang dan Monumen Lasinrang.

Lokasi masjid ini juga sangat strategis, di pertigaan ruas Jalan Jendral Sudirman dan ruas Jalan Bintang yang juga membentang hingga ke depan kantor Bupati Pinrang. Sehingga dapat dengan mudah di akses dari kedua ruas jalan utama tersebut. Masjid megah ini menjadi salah satu Ikon Kabupaten Pinrang.



Gambar 4.1 Masjid agung Al-munawwir Pinrang.

Masjid ini dirintis dan dibangun oleh bapak Drs. H. Andi Nawir MP dan nama masjid ini disebut Al-Munawwir yakni mengabadikan nama perintisnya Bapak H. Andi Munawwir (mantan Bupati Pinrang). Arsitektur Masjid Agung Al-Munawwir, Masjid Agung Al-Munawwir ini memiliki arsitektur yang menawan dengan memadukan arsitektur masjid modern dengan arsitektur Nusantara dan termpatan. Tidak ada kubah bundar di masjid ini. Atap utamanya menggunakan model atap limas yang lancip menjulang berdiri diatas platform struktur beton bersegi delapan, keseluruhan atap masjid ini pada dasarnya merupakan atap bersusun tiga seperti layaknya arsitektur masjid masjid Nusantara.

Empat buah menara mengapit empat penjuru masjid, kesemua menara tersebut dibangun serupa dan sebangun masing masing dilengkapi dengan balkoni sedikit mirip dengan balkoni di menara masjid Nabawi, sedangkan di ujungnya ditempatkan atap limas lancip sama seperti atap utama masjid. Selain empat menara tersebut, masjid ini juga dilengkapi dengan menara kelima yang paling tinggi dan sekaligus menjadi menara pemancar Radio Suara Bumi Lasinrang.

Ruang dalam masjid ini terasa benar benar lega dengan ketiadaan tiang tiang ditengah ruangan utama. Ditambah lagi dengan sisi atasnya yang tidak diberi plafon memberikan kelegaan penuh di dalam masjid ini. Ditambah lagi dengan sisi atasnya yang tidak diberi plafon memberikan kelegaan penuh di dalam masjid ini. Sebuah lampu gantung menjuntai di tengah tengah ruangan dari sisi bawah kubah limasnya.

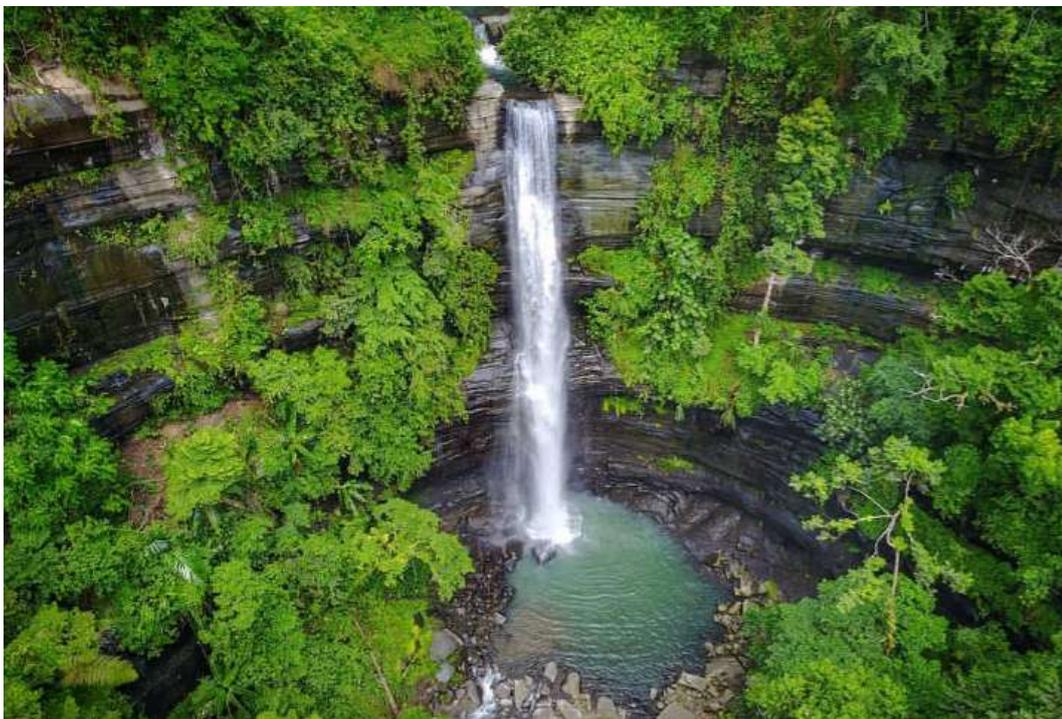
Mihrab masjid ini cukup besar dengan latar belakang warna hitam, sementara mimbarinya tak kalah menarik, terbuat dari kayu dengan bentuk yang hampir serupa dengan ujung menara masjid ini. Tiang tiang besar penyanggah atap masjid ditempatkan di sisi luar area utama sekaligus menjadi penopang area mezanin (lantai dua) yang ditempatkan di sisi kiri dan kanan ruang utama.

## 2. Air Terjun Karawa

Air terjun yang berada di daerah pinrang sangat banyak, semuanya juga sangat indah dan sangat cantik, jadi jika anda nantinya

punya kesempatan berkunjung atau menginjakkan kaki ke tanah petta lasinrang sebaiknya anda mengunjungi beberapa destinasi wisata air terjun yang ada di kabupaten ini. Salah satu air terjun yang mungkin bagus untuk dikunjungi namanya air terjun karawa atau biasa disebut dengan air terjun batu korang.

Air terjun ini juga menjadi wisata andalan dari kabupaten pinrang karena air terjunnya yang indah dan dikelilingi dengan tebing berbentuk khas yang menambah keindahannya. Air terjun karawa terletak di desa karawa, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.



Gambar 4.2 Air terjun karawa

Kelebihan dari air terjun ini yaitu lokasinya bisa dijadikan sebagai tempat yang sangat private baik untuk berlibur sendiri dan menyegarkan diri sendiri dengan ditemani ketenangan, kesejukan, suara alam dan suara air terjun. Air terjun ini juga sangat cocok dijadikan sebagai destinasi wisata bersama teman dan tidak menutup kemungkinan air terjun ini juga bisa dijadikan tempat untuk mengambil foto prawedding, karena anda tidak akan diganggu dengan latar banyaknya orang sebab tempat ini masih sangat sunyi dan masih jarang dikunjungi, maka dari itu air terjun ini bisa dibilang sangat private.

Untuk anda yang ingin berkunjung ke air terjun karawa ini anda harus melakukan perjalanan menuju kabupaten pinrang, kemudian setelah itu anda harus melakukan perjalanan lagi sekitar 40 km ke arah kota Polewali sampai mendapatkan gapura yang ada tulisannya "PLTA Bakaru", dimana pintu gerbang PLTA ini merupakan pintu masuk menuju wisata yang kita cari yaitu karawa. Yang unik dari pintu gerbang ini yaitu pintu bukan hanya pintu masuk ke air terjun karawa namun pintu masuk untuk puluhan wisata yang ada di pinrang namun hanya air terjun karawa yang paling dekat dengan jalan poros, hanya sekitar 5 Km saja.

Setelah sampai di desa karawa anda langsung saja cari gerbang wisata permandian batu korang. dari sini anda akan melalui perjalanan yang cukup sulit karena jalanannya terjal dan menanjak.

Setelah berjalan anda akan melihat tempat untuk parkir kendaraan di dekat loket pembayaran. setelah parkir silahkan registrasi di loket pembayaran dengan membayar Rp.5000/orang dan membayar Rp.5000/motor untuk parkir. Dari loket pembayaran anda masih harus berjalan kurang lebih 15 menit. Saya harap perjalanan anda bisa menyenangkan. Namun kelelahan itu terobati setelah menikmati dinginnya Air Terjun Karawa yang dikelilingi bebatuan dan pepohonan yang asri dan rindang.

Fasilitas yang disediakan di wisata ini masih minim namun sudah bisa menunjang kebutuhan para pengunjung wisata, seperti lahan parkir, loket pembayaran, bangunan yang difungsikan sebagai toilet dan ruang ganti, dan juga ada beberapa pedagang yang menjual makanan ringan.

Air Terjun Karawa saat ini masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat Tarif tersebut digunakan untuk membiayai dan membersihkan sampah-sampah yang ditinggal oleh para pengunjung setiap harinya.

### 3. Bendungan Benteng

Bendungan Benteng adalah salah satu peninggalan Kolonial Belanda bendungan benteng terletak di kecamatan patampanua kabupaten pinrang dan kurang lebih 20 KM sebelah utara jantung kota pinrang bendungan benteng sudah berumur 78 tahun dan mulai dibangun pada tahun 1939 dibawah pimpinan IR.H.M VERWAY

bendungan ini memiliki 8 daun pintu dan mengandung nilai sejarah. Bendungan ini juga mampu mengairi 62.203 hektar persawahan yang ada di bumi lasinrang bahkan bendungan ini mendistribusikan air ke kabupaten tetangga seperti Sidrap dan kabupaten sengkang.



Gambar 4.3 Bendungan Benteng

Bendungan benteng termaksud salah satu cagar budaya yang telah di inventariskan oleh balai pelestarian cagar budaya makassar dengan nomor 874 yang menurut undang-undang nomor 11 tahun 2010 telah memenuhi syarat sebagai bangunan cagar budaya sehingga harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Bendungan benteng banyak

memiliki sejarah karna dibangun dimasa kolonial belanda, dan dibangun dengan sistem kerja rodi atau kerja paksa tanpa istirahat demi membangun benteng dan menurut cerita banyak rakyat yang mati dalam pembangunan benteng ini dan dijadikan sebagai bahan material dalam pembangunan bendungan.

Bendungan Benteng merupakan Bendung Gerak dibangun dengan "system coupure" yang terletak dikelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang berjarak 13 km sebelah utara pusat kota Pinrang atau 196 km dari kota Makassar. Nama Bendung Benteng diambil dari nama kampung dimana bendung itu dibangun yaitu Kampung Benteng.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang**

##### **1. Hasil Penelitian**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mengembangkan potensi masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, dan menyelenggarakan anggaran Alokasi Dana Desa untuk keperluan pembangunan fisik dan nonfisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di desa Sabbang Paru agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tahapan pengelolaannya sebagai berikut :

##### **a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dalam tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang.

Kondisi tersebut sudah sesuai dengan sifat pemerintahan desa yaitu bersifat partisipatif. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa Sabbang Paru.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang, musrebang sendiri adalah singkatan dari musyawarah rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa.

Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa sehingga pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aspirasi atau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Akan tetapi, fakta yang peneliti dapatkan dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Sabbang Paru masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum

menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Tahapan Perencanaan ADD Desa Sabbang Paru dalam Kegiatan Musrembang

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Hadir	15
		Hadir dan Berpendapat	5
		Tidak Hadir	10
	Pokok Bahasan	Jumlah Anggaran	15
		Penyusunan Rencana	3
		Tidak Tahu	12
	Hasil Musrembang	Tersusunnya DURK	-
		Belum Tersusunnya DURK	15
		Tidak Tahu	10
	Sosialisasi DURK kepada Masyarakat	Ada	5
		Tidak Ada	15
		Tidak Tahu	5

Sumber : Data diolah dari kantor Desa Sabbang Paru Tahun 2018

Keterangan : DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi atau pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Dari 25 orang kalangan masyarakat, sebanyak 15 orang yang menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi atau usulan rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang lainnya tidak hadir.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Sabbang Paru yaitu Bapak yang berinisial DR mengenai tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

*“Dalam proses musrembang yang dilakukan oleh pemerintah desa, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap pembangunan desa itu sangat rendah.” (wawancara 30 Agustus 2018).*

Berkaitan dengan apa yang di sampaikan oleh bapak yang berinisial DR di atas hal itu sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan pada saat melakukan wawancara dengan masyarakat, kebanyakan memang yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Selanjutnya pada Tabel 5.1 diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses musrembang desa pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. dari 25 orang masyarakat, hanya 5 orang yang mengatakan bahwa dalam musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 15 orang lainnya mengatakan bahwa dalam musrembang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan sisanya sebanyak 2 orang mengatakan tidak tahu.

Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu Bapak yang berinisial ST yang mengatakan bahwa:

*“Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir dalam kegiatan musrembang, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa” (Wawancara 03 September 2018).*

Pernyataan salah satu masyarakat di atas mengindikasikan bahwa salah satu penyebab dari kurangnya partisipasi masyarakat adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak berjalan efektif.

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat Desa Sabbang Paru tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam tabel 5.1 Terlihat bahwa 25 orang masyarakat, seluruh masyarakat yang hadir yaitu sebanyak 15 sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan.

Sedangkan 10 orang masyarakat lainnya mengatakan tidak tahu sebab mereka tidak menghadiri kegiatan musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat Desa Sabbang Paru.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat di Desa Sabbang Paru yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana penegelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan mengembangkan potensi masyarakat desa Sabbang Paru namun tetap

mempertimbangkan kebutuhan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak kepala desa, yaitu bapak yang berinisial DR yang menyatakan bahwa:

*“Kegiatan musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan pembuatan rabat beton yang kemudian nantinya akan mempermudah masyarakat dalam hal aksesnya ke lahan pertanian maupun perkebunan” (Wawancara tanggal 30 Agustus 2018).*

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat.

Akan tetapi, dari tabel 5.1 diatas terlihat bahwa dari 25 orang masyarakat hanya 5 orang mengatakan bahwa DURK di informasikan kepada masyarakat, sebanyak 15 orang mengatakan bahwa tidak ada informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 5 orang mengatakan tidak tahu.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sabbang Paru yaitu Bapak yang berinisial SL yang mengatakan bahwa:

*“Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Sabbang Paru ini memang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan penonton yang menyaksikan, setiap kegiatan yang terjadi di desa” (wawancara 04 September 2018).*

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak yang berinisial DR selaku Kepala Desa, bapak yang berinisial ST selaku masyarakat, dan bapak yang berinisial SL juga selaku masyarakat Desa Sabbang Paru. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat Desa Sabbang Paru adalah dampak dari sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat terkait kegiatan musrembang yang tidak berjalan efektif.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan dan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang masih kurang baik.

#### **b. Tahap Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Bagian ini adalah tahap kedua dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, pada tahap ini semua Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK)

yang telah di setuju pada saat musrembang akan di realisasikan dalam bentuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat, dengan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sabbang Paru didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2008 pasal 15 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2018 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa proporsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2018, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Sabbang Paru adalah sebesar Rp.1.053.293.000 (Satu Milyar Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Adapun terkait rincian anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan dalam pembangunan fisik dan mengembangkan potensi masyarakat atau sering disebut dengan istilah pemberdayaan di desa Sabbang Paru dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Pengalokasian Anggaran ADD Tahun 2018

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan Intensif Kader Posyandu	4.080.000
	Bantuan Intensif Guru TPA	16.200.000
	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	32.046.000
	Bantuan Pengadaan Bibit	146.431.000
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	9.250.000
	Pojok Treansparansi	5.000.000
Pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan Rabat Beton	847.593.000
Total		1.053.293.000

Sumber : Diolah dari pojok transparansi desa Sabbang Paru tahun 2018

Dari tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Sabbang Paru adalah sebesar Rp 1.053.293.000, dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Sabbang Paru diperuntuhkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan jenis kegiatan yakni, bantuan intensif kader posyandu dengan anggaran sebesar Rp 4.080.000, bantuan intensif guru TPA dengan anggaran sebesar Rp 16.200.000, bantuan pemberdayaan bidang olahraga dengan anggaran sebesar Rp 32.046.000, batuan pengadaan bibit dengan anggaran sebesar Rp 146.431.000, penyelenggaraan musyawarah desa dengan anggaran sebesar Rp 9.250.000, pojok transparansi dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000, dan

untuk pelaksanaan pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni pembangunan rabat beton digunakan anggaran sebesar Rp 847.593.000.

Informasi yang diperoleh dari 15 responden terkait tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sabbang Paru bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di desa Sabbang Paru yaitu pembangunan rabat beton dan pengadaan bibit. Informasi yang diperoleh dari 15 responden bahwa dalam kegiatan tersebut hanya sedikit masyarakat yang berpartisipasi untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Sabbang Paru yaitu Bapak yang berinisial DR yang menyatakan bahwa:

*“Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangankan dipanggil untuk bekerja secara gotong royong, dipanggil pada saat musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah. Namun kami dari pihak pemerintah desa melakukan inisiatif dengan cara mempekerjakan masyarakat setempat yang punya keahlian di bidang tersebut dan mereka di berikan upah atau gaji.” (wawancara 30 Agustus 2018).*

Hasil wawancara di atas telah sesuai dengan fakta yang peneliti temukan di lapangan dan hal sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih

dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat , yaitu Bapak yang berinisial BC yang menyatakan bahwa:

*“Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat tidak di undang untuk hadir dalam kegiatan musrembang yang dilakukan oleh pemerintah desa” (wawancara 04 September 2018).*

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan satu fakta baru selain dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga diakibatkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak di undang dalam menyampaikan usulan untuk pembangunan desa.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat desa Sabbang Paru yaitu Bapak yang berinisial ZN selaku kepala dusun Kanipang yang menyatakan bahwa:

*“Salah satu alasan kenapa tidak semua masyarakat diundang pada saat musrembang karna tempat yang tidak cukup untuk menampung jika semua masyarakat di undang. Jadi kami pemerintah setempat hanya mengundang orang yang di anggap sebagai tokoh di tengah masyarakat .” (wawancara 05 September 2018).*

Pernyataan salah satu perangkat desa diatas telah menjawab hasil wawancara sebelumnya dengan masyarakat yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat diundang dalam kegiatan musrembang.

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Sabbang Paru ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan rabat beton, pengadaan bibit, bantuan intensif guru TPA, serta bantuan pemberdayaan bidang olahraga dapat terselesaikan dengan baik namun hal ini dianggap kurang tepat sasaran karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di desa Sabbang Paru belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya, Bapak yang berinisial MJ yang menyatakan bahwa:

*“Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah,” (wawancara 05 September 2018).*

Pendapat lain terkait belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa, disampaikan juga oleh Bapak yang berinisial MA yang menyatakan bahwa:

*“kegiatan pemberdayaan masyarakat yakni salah satunya pengadaan bibit sebenarnya sudah cukup baik karena akan membuat masyarakat mudah dalam mendapatkan bibit untuk pertanian mereka tanpa harus pergi mencari lagi. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan terkait pendistribusian kepada masyarakat sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkannya dan itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang terjadi di desa” (wawancara 07 September 2018).*

Melihat berbagai masalah diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam mengembangkan potensi masyarakat di desa Sabbang Paru dapat dikatakan kurang efektif hal ini diakibatkan karna pembangunan yang dilakukan tidak pada esensi yang sesungguhnya yaitu memberdayakan masyarakat.

**c. Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahap penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang, dalam tahapan pertanggungjawaban ini efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di susun oleh pemerintah desa, namun tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggungjawaban Desa Sabbang Paru memang disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara atau Kaur Keuangan Desa Sabbang Paru yaitu Ibu yang berinisial ML yang menyatakan bahwa:

*“Kualitas SDM pemerintah Desa Sabbang Paru ini memang masih tergolong rendah, namun hal ini bisa ditingkatkan melalui pelatihan yang sering diadakan oleh pemerintah kabupaten.*

*Sehingga kami bisa lebih mengetahui tugas dan tanggung jawab kami selaku orang-orang yang dipercaya untuk mengelola anggaran alokasi dana desa ini. Jadi semua tahap kami yang mengerjakan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.” (Wawancara 31 Agustus 2018)*

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa meskipun SDM yang dimiliki oleh perangkat desa tergolong rendah namun melalui pelatihan yang di adakan oleh pemerintah kabupaten dapat dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan SDM yang dimiliki oleh perangkat desa.

Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabbang Paru sudah baik, dimana Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sabbang Paru yaitu bapak yang berinisial DR, yang mengemukakan bahwa:

*“Desa Sabbang Paru ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Sabbang Paru juga selalu diterima oleh pemerintah kabupaten.” (Wawancara 30 Agustus 2018).*

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan untuk mengembangkan potensi masyarakat yang ada di desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sabbang Paru tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dengan masyarakat Desa Sabbang Paru. Dari 20 responden tidak ada satupun responden yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa Sabbang Paru.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak yang berinisial AA yang menyatakan bahwa:

*“Pemerintah Desa Sabbang Paru tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Sabbang Paru ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak” (Wawancara 07 September 2018)*

Hasil wawancara diatas menjadi salah satu bukti kurang efektifnya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa karna hanya melakukan pertanggungjawaban ke pemerintah kabupaten tanpa melakukan hal sama kepada masyarakat.

Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu yang berinisial SG yang menyatakan bahwa:

*“Yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat Desa Sabbang Paru ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Sabbang Paru ini” (Wawancara 05 September 2018)*

Berdasarkan dari berbagai informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa walaupun secara administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Sabbang

Paru dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dilakukan hanya kepada pemerintah kabupaten sedangkan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa tidak dilakukan. Maka tahapan peertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sabbang Paru dapat dikatakan kurang efektif.

## **2. Pembahasan**

Defenisi Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu (Prajudi Atmosudirjo, 1982). Jika merujuk pada definisi tersebut kemudian mengaitkannya dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa berarti kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya dalam hal ini adalah Alokasi Dna Desa untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sabbang Paru secara normatif dan admistratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus dievaluasi yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung-jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan yang di canangkan oleh pemerintah desa. Pada bagian hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satu diantaranya adalah kurangnya sosialisai kepada masyarakat sehingga program yang telah disepakati bersama tidak diketahui oleh seluruh masyarakat.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang di katakan oleh Robert Chambers dalam teori pemberdayaan masyarakat bahwa dalam melakukan pembangunan harus mengutamakan manusianya atau menjadikan manusia sebagai subjek bukan sebaliknya. Jika meihat apa yang terjadi di desa Sabbang Paru, pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah setempat menjadikan manusia sebagai objek dari pembangunan seperti kebanyakan Negara dunia ketiga dimasa orde baru. Hal ini dapat dilihat dari apa yang di prioritaskan oleh pemerintah desa dalam melakukan pembangunan yaitu lebih mengutamakan pembangunan fisik seperti pembangunan rabat beton, pengadaan jalan desa, dan pembangunan duekker atau tempat duduk.

Seharusnya manusia di jadikan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan sehingga tingkat partisipasi dari masyarakat bisa lebih optimal. Masyarakat juga akan lebih percaya kepada pemerintah desa jika merasa dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini juga akan sejalan dengan model pembangunan di desa yaitu bersifat partisipatif jika sebagian besar masyarakat dilibatkan dalam setiap pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa.

Kurangnya program pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat juga mengakibatkan pembangunan yang dilaukan seolah-olah hanya mementingkan aspek fisik atau infrastruktur dan mengabaikan aspek nonfisik atau manusianya yang seharusnya menjadi subjek dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan terpusat pada manusia, pemikiran yang muncul dari teori ini melihat secara tajam bagaimana pembangunan yang

dipraktekkan tidak berpihak pada manusia, yang seharusnya diletakkan dalam posisi subjek dalam pembangunan bukan sebagai objek seperti yang selama ini dilakukan oleh negara penganut modernisasi.

Pembangunan yang dilakukan di desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang melenceng dari sifat pembangunan pedesaan yaitu bersifat partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Fakta yang menunjukkan kurang efektifnya pembangunan di desa Sabbang Paru yaitu masyarakat sangat kurang yang ikut terlibat dalam pembangunan dan program pembangunan terkait pemberdayaan juga sangat kurang dan kalupun ada program mengenai pemberdayaan hal ini di anggap tidak tepat sasaran karna tidak melihat potensi yang dimiliki masyarakat. Misalnya beberapa program pemberdayaan seperti bantuan intensif kader posyandu, bantuan pemberdayaan bidang olahraga, dan pojok transparansi.

Contoh program pemberdayaan yang kurang tepat sasaran adalah bantuan intensif posyandu, hal ini dapat dilihat dari kondisi posyandu yang tidak terawat dan selalu sepi dari pasien karna masyarakat lebih memilih memeriksakan penyakitnya ke puskesmas yang ada di kecamatan karna selain pelayanan yang baik fasilitasnya juga sudah memadai untuk puskesmas tingkat kecamatan.

Kemudian yang kedua adalah bantuan pemberdayaan bidang olahraga, jika melihat sapnduk yang dipasang di depan kantor desa maka program ini termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang tertera di spanduk tersebut. Namun program ini juga kurang tepat sasaran karna selain banyaknya anggaran yang dikeluarkan untuk program ini juga hanya beberapa kelompok masyarakat yang dapat menikmatinya. Padahal yang lebih dibutuhkan masyrakat adalah program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga dengan meningkatnya pendapatan atau penghasilannya mereka dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan dengan melihat beberapa fakta yang terjadi dilapangan dan menjadikan hasil penelitian ataupun wawancara sebagai bahan pertimbangan maka penulis menyimpulkan bahwa pembangunan di desa Sabbang Paru kurang efektif.

### **3. Kesesuaian Teori Dengan Hasil penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori ketergantungan kekuasaan, alasan peneliti menggunakan teori ini karna sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Teori ini membahas mengenai proses pemberdayaan.

Kekuasaan merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan dari Nicollo Machiavelli ( *The Prince* , awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes ( *Leviathan* abad, pertengahan-17). Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian

dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997).

Lebih lanjut (Abbot, 1996:16-17) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan, dimana teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Menurut Abbot (1996: 20) dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan. yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan.

Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang/modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya/kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan/modal yang kuat. Selain uang/modal, maka ilmu pengetahuan/knowledge dan aspek people/sekumpulan orang/ massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut mempunyai power. Kelompok yang memiliki *power* maka kelompok itu akan berdaya.

Dalam hal ini terkait pengembangan potensi masyarakat desa maka Alokasi Dana Desa (ADD) dapat menjadi *power* dalam membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat desa dapat menjadi masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhannya maupun dalam menemukan solusi dalam setiap permasalahan kesehariannya.

Teori ketergantungan kekuasaan juga harus didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai. jika dikaitkan dengan hasil penelitian maka yang menjadi permasalahan adalah buruknya pengelolaan yang dilakukan

oleh pemerintah desa sehingga fungsi atau tujuan dari alokasi dana desa ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

## **B. Efektifitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang**

### **1. Hasil Penelitian**

Pembentukan Peraturan Daerah serta pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu cara bagi setiap daerah untuk mengatur sendiri daerahnya serta memberikan peluang bagi daerah dalam upaya peningkatan pembangunan serta pengembangan potensi – potensi yang dimiliki daerah menjadi lebih baik. Kabupaten Pinrang termasuk salah satu Kabupaten yang berupaya melakukan pembangunan - pembangunan di daerahnya.

Dalam melaksanakan suatu peraturan pemerintahan harus memahami isi dari peraturan tersebut. Terkait dengan alokasi dana desa yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan keuangan desa dan sumber pendapatan desa serta peraturan pemerintah RI No.72 Tahun 2005 tentang Desa yang dijelaskan pada pasal 68 tentang sumber pendapatan desa, dijelaskan juga didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Dan untuk melihat dengan menelaah beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

**a. Kejelasan Tujuan yang Hendak dicapai**

Mengetahui secara jelas dan rinci tujuan yang hendak dicapai merupakan aspek yang paling mendasar dalam hal pemanfaatan sesuatu seperti halnya alokasi dana desa. Tujuan yang ingin dicapai, hendaklah menjadi fokus serta pedoman bagi setiap pelaksana dalam melaksanakan upaya pencapaian tujuan dari pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2008 pasal 15 yang akan direalisasikan dalam bentuk program kerja pemerintahan sebagaimana dari hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu bapak yang berinisial DR sebagai berikut :

*“Tujuan dari alokasi dana desa (ADD) tertuang di dalam Perda Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.” (wawancara 30 Agustus 2018).*

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa dalam hal aturan pemerintah desa telah melaksanakannya sebagaimana mestinya namun yang menjadi kekurangan adalah kegiatan yang bersifat pemberdayaan sangat kurang dalam setiap perencanaan kerja. Jadi meskipun tujuan yang hendak dicapai sudah sangat jelas tetap saja menjadi kurang efektif karna tidak sejalan dengan model pembangunan didesa yang bersifat memberdayakan.

## **b. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan**

Kejelasan strategi dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam upaya pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Strategi yang jelas menjadi tolak ukur kontribusi setiap aspek yang bertanggung jawab dan berperan serta dalam pengelolaan, pemanfaatan alokasi dana desa serta menjadi tolak ukur bagi tingkat keberhasilan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya guna tercapainya peningkatan bagi perekonomian desa dan pembangunan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. dalam merancang strategi tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pihak desa agar terciptanya suatu keberhasilan yang diinginkan.

Kejelasan strategi dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam upaya penempatan tenaga kerja lokal. Strategi merupakan hal yang berkaitan dengan upaya - upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu bapak yang berinisial DR sebagai berikut :

*“Kami selaku pihak pemerintah desa memiliki strategi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat.”* (wawancara 30 Agustus 2018).

Hasil wawancara diatas merupakan upaya atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam segala bidang penyelenggaraan pembangunan desa, namun hal yang peneliti dapatkan dilapangan upaya

yang dilakukan oleh pemerintah desa diatas belum sampai kepada tujuan yang hendak dicapai.

**c. Proses Analisis Dan Perumusan**

Dalam melaksanakan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya dalam pembagian besaran jumlah dana ADD yang dibagikan kepada setiap desa selain menggunakan rumusan yang ada, pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah yang menjadi ukuran dalam memberikan besaran jumlah ADD. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu bapak yang berinisial DR sebagai berikut:

*“kami pihak desa dalam membuat kebijakan berpedoman pada kebijakan dari pemerintah pusat dan kabupaten yakni 30% untuk operasional dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.”*  
(wawancara 30 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas tidak sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan di lapangan melihat dari program yang dicanangkan oleh pemerintah desa terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang kurang dan belum menyentuh esensi dari kebutuhan masyarakat.

**d. Perencanaan Yang Matang**

Dalam hal ini pemerinta Desa Sabbang Paru mempunyai tugas untuk menjalankan kerjasama dan kordinasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Untuk membuat suatu perencanaan pemerintah desa Sabbang Paru melibatkan beberapa anggota pemerintah desa, anggota BPD, anggota LPMD, dan juga melibatkan masyrarakat dalam membuat suatu perencanaan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sabbang Paru yaitu Bapak yang berinisial DR sebagai berikut:

*“kami melakukan musyawarah dengan anggota BPD, LPMD, dan masyarakat untuk menentukan program - program kedepannya.” (wawancara 30 Agustus 2018).*

Dari hasil wawancara diatas peneliti berharap hal ini bisa menjadi upaya untuk membenahi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga program yang di hasilkan dari setiap musyawarah dapat menjadikan masyarakat desa menjadi masyarakat yang berdaulat terhadap diri mereka sendiri melalui proses pemberdayaan.

**e. Penyusunan Program Yang Tepat.**

Keberhasilan pencapaian tujuan tidak terlepas dari program yang akan dilakuan guna pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD), penyusunan dan pelaksanaan program yang tepat akan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dan pembangunan desa. Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah desa telah dibuat program – program yang berupaya untuk mewujudkan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD), dari hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut :

*“pemerintah desa memiliki program - program melalui rencana pembangunan jangka menengah desa program ini ditetapkan berdasarkan peraturan desa Sabbang Paru.” (wawancara 30 Agustus 2018).*

Hasil wawancara dengan bapak kepala desa diatas menunjukkan bahwa proses penyusunan program pembangunan didasarkan pada peraturan desa Sabbang Paru. Meskipun demikian dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan pemerintah desa tidak menjadikan program

pemberdayaan sebagai hal yang utama. Sehingga setiap program yang dijalankan kurang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

**f. Tersedianya Sarana Dan Prasarana.**

Tersediannya sarana dan prasarana merupakan hal pendukung dalam pemanfaatan maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini meningkatkan pembangunan - pembangunan desa dalam pembangunan fisik. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, dalam menyelenggarakan kegiatan tujuannya perbaikan jalan umum. Hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan desa Sabbang Paru :

*“kami selaku pemerintah desa sangat memprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur desa tetapi dalam pembangunan skala kecil seperti pembangunan balai Desa, Papan Nama Kantor Desa Sabbang Paru , perbaikan jalan dusun dan perbaikan - perbaikan gedung posyandu.”* (wawancara 02 September 2018).

Sarana dan prasarana yang ada didesa Sabbang Paru sudah ada namun tidak difungsikan sebagaimana mestinya seperti contohnya posyandu yang ada didesa selalu terlihat kosong dan jarang masyarakat yang berkunjung. Seperti pada saat akan melaukan imunisasi kepada balita sering dilakukan dirumah warga yang seharusnya hal ini dilakukan di posyandu.

**g. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik**

Salah satu fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan. Mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan

antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumberdaya dipergunakan secara fektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Dalam pemanfaatan alokasi dana desa diawasi oleh BPD dan inspektorat Kabupaten dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sabbang Paru sebagai berikut :

*“dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD setiap akhir tahun diaudit oleh inspektorat tingkat kabupaten atas laporan pertanggung jawaban (LPJ) dan pihak pemerintah desa bekerja sama dengan perangkat BPD dan dalam melaksanakan pengawasan juga melibatkan masyarakat desa Sabbang Paru.”* (wawancara 30 Agustus 2018)

Pemanfaatan dana ADD dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atas sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala desa.

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari dukungan penuh dari masyarakat. Pemerintah desa selaku pihak yang merencanakan pembangunan perlu melaksanakan interaksi yang sehat dengan

masyarakatnya sehingga dukungan dari masyarakat dapat diperoleh dengan penuh.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak ketimpangan yang terjadi dalam setiap proses pembangunan hal ini diakibatkan oleh sistem pemerintahan yang berjalan pincang tanpa melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Dari ketujuh indikator diatas untuk melihat sejauh mana efektifitas pemanfaatan alokasi dana desa oleh pemerintah setempat, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa setiap proses yang dilakukan jauh dari kata efektif.

## **2. Pembahasan**

Konsep efektivitas dapat didekati dari dua segi, yaitu tujuan dan teori sistem. Pendekatan tujuan memandang bahwa organisasi itu dibentuk dengan suatu tujuan dan oleh karena itu orang-orang di dalamnya berusaha secara rasional agar tujuan tercapai, dengan demikian, efektivitas diartikan sebagai pencapaian yang telah disepakati bersama.

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson dalam Sulastri Nova (2016) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antarproduksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tujuh indikator untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa

dalam proses pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Sabbang Paru. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan pada saat peneliti melakukan penelitian.

Misalnya kejelasan tujuan yang ingin dicapai dari setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah desa tidak jelas seolah-olah bahwa setiap program yang dilakukan hanya untuk menggugurkan tanggungjawab sebagai pihak yang mengelola alokasi dana desa.

Padahal semestinya alokasi dana desa ini sudah lebih dari cukup jika digunakan dengan baik untuk memberdayakan masyarakat di desa Sabbang Paru. Buktinya dari setiap program keja yang di paparkan di pojok transparansi belum ada yang menyentuh langsung kepada pemberdayaan masyarakat. Misalnya tidak ada program kerja untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Belum lagi proses pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten yang seharusnya 30% anggaran digunakan untuk biaya operasional dan 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bukti yang paling nyata dari tidak sesuainya pengalokasian anggaran ini adalah lebih banyak anggaran yang dialokasikan pemerintah

desa untuk pembangunan fisik dibanding untuk pemberdayaan masyarakat.

Adapun pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia kegiatan seperti ini lebih sering di adakan oleh pemerintah kabupaten jadi pihak pemerintah desa hanya mengutus beberapa orang untuk mengikuti pelatihan. Itupun yang diutus untuk ikut pelatihan hanya orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi dari hal seperti ini terjadi diskriminasi karna hanya orang-orang tertentu saja yang di ikutkan.

Hal lain yang menjadi faktor kurang efektifnya pemanfaatan alokasi dana desa ini adalah proses perencanaan yang kurang matang, buktinya dalam kegiatan musrembang yang dilaksanakan oleh pemerintah desa hanya di ikuti oleh sedikit masyarakat. Sehingga apa yang menjadi keputusan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kedepan tidak di sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Berikutnya dari sistem pengawasan untuk setiap program pembangunan dan pemberdayaan tidak menjadikan masyarakat sebagai pengawas yang langsung melihat setiap proses yang dilakukan. Dan tidak melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jika melihat aturan yang ada seharusnya pertanggungjawaban dilakukan juga kepada masyarakat sebagai orang yang menikmati apa yang telah dibangun oleh pemerintah.

Dari keseluruhan hasil penelitian ada yang mejadi faktor mendasar dari kurang efektifnya proses pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang terjadi di desa Sabbang Paru yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap apa yang ingin dan telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Hal inilah yang menjadikan setiap proses pemberdayaan tidak berjalan efektif karna model dari pembangunan di desan seharusnya bersifat partisipatif malah yang terjadi kurang masyarakat yang terlibat dalam setiap prosesnya. Padahal fungsi masyarakat dalam pembangunan di desa selain menjadin pengawas juga menjadi pelaku dari setiap kegiatan.

Dari beberapa uraian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan denga melihat beberapa faktor yang menjadi acuan dalam menentukan efektif tidaknya pemanfaatan alokasi dana desa dalam mengembangkan potensi masyarakat. Dari beberapa indikator di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses pemanfaatan alokasi dana desa di desa Sabbang Paru masih kurang efektif.

### **3. Kesesuaian Teori dengan Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pembangunan terpusat pada manusia, alasan peneliti menggunakan teori ini karna sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Teori membahas mengenai pemberdayaan yaitu menjadikan manusia sebagai subjek dari pembangunan bukan sebagai objek seperti yang kebanyakan terjadi saat ini.

Kegagalan teori pembangunan modernisasi telah menyadarkan banyak pihak kepentingan terhadap pembangunan agar “mengutamakan manusia” dalam proyek-proyek pembangunan. Ini berarti memberikan manusia lebih banyak peluang untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan pembangunan sehingga manusia menjadi subjek yang aktif dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembangunan (Damsar, 2016: 215).

Terkait dengan pengertian diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa ini juga bermakna apapun kebijakan atau program pembangunan harus mengutamakan manusianya ketimbang lainnya. Makna tersirat di dalamnya adalah apapun bentuk kerusakan, penyelewengan, kegagalan, kerusuhan, dan sebagainya berpangkal pada mengabaikan manusia dalam perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan program.

Teori pembangunan terpusat pada manusia memiliki bermacamvarian teori pembangunan aplikatif seperti teori “mengutamakan manusia dalam pembangunan” dari Cernea dkk., teori pembangunan perdesaan mulai dari belakang yang muncul dari pemikiran Robert Chambers dengan pendekatan PRA-nya, dan teori pemberdayaan masyarakat.

Inti dari kesemua teori tersebut adalah bagaimana manusia diposisikan sebagai aktor sosial yang aktif dalam peran sertanya pada berbagai proses pembangunan. Dalam teori-teori tersebut partisipasi merupakan kata kunci dalam proses pembangunan.

Dari hasil penelitian memberikan kepada kita satu fakta yang mendasar bahwa apa yang terjadi di desa Sabbang Paru terkait proses pemberdayaan dan pembangunan tidak melibatkan masyarakat secara langsung, mereka hanya dijadikan sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek.

Menurut teori ini masyarakat seharusnya dijadikan sebagai subjek dari pembangunan, hal ini juga sejalan dengan model pembangunan pedesaan yaitu partisipatif. Jika masyarakat menjadi subjek dari pembangunan otomatis mereka akan terlibat langsung dalam setiap proses yang terjadi sehingga mereka akan menganggap bahwa setiap pembangunan memang memprioritaskan masyarakat.

Kedua, masyarakat akan lebih memercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, munculnya anggapan bahwa partisipasi merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Dari uraian penjelasan mengenai partisipasi dan pentingnya partisipasi maka peneliti menarik kesimpulan bahwa mengabaikan aspek partisipatif dalam pembangunan dengan dimensi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan *monitoring* akan menyebabkan manusia diposisikan sebagai objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki manusia, baik sebagai

individu maupun kelompok diabaikan. Aspek inilah yang akan dipulihkan melalui pemberdayaan masyarakat.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang) tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pengembangan potensi masyarakat di desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa Sabbang Paru kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian juga kurang efektif, karena penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan masih kurang efektif berdasarkan proses realisasi anggaran yang tidak tepat

sasaran. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah desa Sabbang Paru hanya melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah kabupaten sedangkan seharusnya juga dilakukan pertanggungjawaban bersama masyarakat desa Sabbang Paru. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat didesa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan efektivitas maka peneliti menggunakan beberapa indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas diantaranya kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Sesuai dengan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Sabbang Paru masih rendah berdasarkan uraian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa pada poin pertama di atas.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Sabbang Paru, dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Sabbang Paru kepada masyarakat. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Sabbang Paru kepada masyarakat desa sehingga masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa bias melakukan evaluasi.
2. Sebagai Pemerintah Desa Sabbang Paru perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa. Juga perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldy, Riko. 2012. *Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011*.
- Azwardi, dan Sukanto Sukanto."Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. "*Journal of Economics & Development Policy* 12.1 (2014): 29-41.
- Damsar, dan Indrayani.(2016). *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana.
- Danu Wisakti, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008.
- Gie, T. L. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Hafid Risma, 2017. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*. Universitas Hasanuddin.
- Handayani, Soewarno. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasian Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Majdi, Udo Yamin Efendi. 2007. *Quranic Quotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Muntah Anah, Siti. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ekonomi.
- Nasution IY, 2017. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Nata*. Universitas Sumatera Utara.
- Novita Dian, 2016. *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Serta Multiplier Effect Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putra, C. K. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203-1212.
- Rais, H.E. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saputra, I.W. (2014). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. Jurnal Pendidikan Ekonomi.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulastri, Nova. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Kendari: Universitas Halu Oleo.

Wasistiono Sadudan Tahir Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Widjaja, A.W. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Online

<https://arpansiregar.wordpress.com/2012/08/10/konsep-pemberdayaan-masyarakat/>. Di aksestanggal 20 Mei 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan\\_masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat). Diakses tanggal 20 Mei 2018.

<https://prASFapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>. Diakses tanggal 04 Juli 2018.

# LAMPIRAN

## **PEDOMAN WAWANCARA 1**

Daftar pertanyaan wawancara bertujuan untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data tentang “ Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)”.

### Identitas Responden

Nama :.....

Jenis Kelamin :.....

Umur :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

1. Apa visi & misi Pemerintah Desa Sabbang Paru?
2. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan visi & misi tersebut?
3. Berapa besaran Dana ADD Yang diterima Pemerintah Desa Sabbang Paru Setiap Tahunnya?
4. Bagaimana Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
5. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan?
6. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
7. Apakah ada Kendala dari Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa?

8. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban mengenai Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa?
9. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat?
10. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa?
11. Apakah ada kerjasama/keterlibatan pemerintah desa dengan pihak ketiga/swasta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?
12. Sejauh ini apakah semua program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah desa berjalan dengan baik atau tidak?

## PEDOMAN WAWANCARA 2

Daftar pertanyaan wawancara ini bertujuan untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data tentang “ Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)”.

### A. Identitas Responden

Nama :.....

Jenis Kelamin :.....

Umur :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

### B. Pertanyaan

#### 1. Aspek bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

- a. Apakah bapak/ibu bekerja sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan?
- b. Apakah bapak/ibu sudah diberikan pendampingan oleh pendamping desa dalam pengelolaan add?
- c. Apakah bapak/ibu tahu semua program sudah dijalankan?
- d. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat menggunakan alokasi dana desa?
- e. Menurut bapak/ibu apakah program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif atau tidak ?

**2. Aspek bidang pelaksanaan pembangunan.**

- a. apakah bapak/ ibu tahu tentang mekanisme/tatacara pengelolaan ADD untuk infrastruktur?
- b. Apakah semua program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat?
- c. Apakah pada tahun 2018 ada peningkatan pembangunan infrastruktur?
- d. Apakah bapak/ibu terlibat aktif dalam proses penyusunan program sampai dengan jalannya program?
- e. Bagaimana cara bapak/ibu terlibat dalam pembangunan infrastruktur?
- f. Manfaat apa saja yang bapa/ibu rasakan dari program infrastruktur?

**3. Aspek bidang pembinaan masyarakat.**

- a. Setelah pembentukan kelompok apakah dari pihak desa melakukan pembinaan?
- b. berapa jumlah dana untuk setiap kelompok binaan?
- c. apakah bapak ibu tahu tentang besaran dana?
- d. Pembinaan apa saja yang dilakukan oleh aparat desa atau tim pendamping?
- e. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa?
- f. Apakah ada pendampingan terhadap kelompok sasaran pembinaan?
- g. Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan?

**4. Aspek bidang pemberdayaan masyarakat.**

- a. Apakah bapak/ibu pernah dibuat pelatihan untuk peningkatan ekonomi?

- b. Apakah bapak/ibu tahu tentang alokasi dana untuk kelompok pemberdayaan?
- c. Apakah pendapatan ekonomi bapak/ibu meningkat setelah ada pelatihan?
- d. Apakah bapak/ibu tahu tentang besaran dana untuk pemberdayaan masyarakat?
- e. Manfaat apa saja yang bapak/ibu rasakan?
- f. Apakah bapak/ibu puas dengan pembangunan yang ada?

## PEDOMAN OBSERVASI

NO	KEGIATAN	Tahun 2018					
		mei	jun	jul	agu	sep	okt
1	TAHAP PERSIAPAN PENELITIAN	•					
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul	•					
	b. Pengajuan Proposal		•	•			
	c. Perijinan Penelitian				•		
2	TAHAP PELAKSANAAN				•		
	a. Pengumpulan Data				•		
	b. Analisis Data					•	
3	TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN						•

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Dusun Kanipang



Foto bersama Kepala Desa Sabbang Paru

APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DESA SABBANG PARU KEC. LEMBANG		Pendapatan Rp. 1.984.041.106,-																									
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> Rp. 211.149.406,-		<table border="1"> <tr><td>1. PAD</td><td>Rp. 3.000.000,-</td></tr> <tr><td>2. Alokasi Dana Desa</td><td>Rp. 1.053.293.000,-</td></tr> <tr><td>3. Ekoran Dana</td><td>Rp. 829.383.000,-</td></tr> <tr><td>4. Sisa ADD 2017</td><td>Rp. 6.172.400,-</td></tr> <tr><td>5. Sisa DD 2017</td><td>Rp. 90.918.700,-</td></tr> <tr><td>6. Sisa PAD 2017</td><td>Rp. 1.277.000,-</td></tr> </table>		1. PAD	Rp. 3.000.000,-	2. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.053.293.000,-	3. Ekoran Dana	Rp. 829.383.000,-	4. Sisa ADD 2017	Rp. 6.172.400,-	5. Sisa DD 2017	Rp. 90.918.700,-	6. Sisa PAD 2017	Rp. 1.277.000,-												
1. PAD	Rp. 3.000.000,-																										
2. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.053.293.000,-																										
3. Ekoran Dana	Rp. 829.383.000,-																										
4. Sisa ADD 2017	Rp. 6.172.400,-																										
5. Sisa DD 2017	Rp. 90.918.700,-																										
6. Sisa PAD 2017	Rp. 1.277.000,-																										
<table border="1"> <tr><td>1. Sintang, Tunjangan Kades &amp; Perangkat Desa</td><td>Rp. 117.900.000</td></tr> <tr><td>2. Tunjangan BPD</td><td>Rp. 28.800.000</td></tr> <tr><td>3. Operasional Perkantoran</td><td>Rp. 60.449.406</td></tr> <tr><td>4. Operasional BPD</td><td>Rp. 2.000.000</td></tr> <tr><td>5. Operasional RW</td><td>Rp. 2.000.000</td></tr> </table>		1. Sintang, Tunjangan Kades & Perangkat Desa	Rp. 117.900.000	2. Tunjangan BPD	Rp. 28.800.000	3. Operasional Perkantoran	Rp. 60.449.406	4. Operasional BPD	Rp. 2.000.000	5. Operasional RW	Rp. 2.000.000	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b> Rp. 1.554.884.400,-															
1. Sintang, Tunjangan Kades & Perangkat Desa	Rp. 117.900.000																										
2. Tunjangan BPD	Rp. 28.800.000																										
3. Operasional Perkantoran	Rp. 60.449.406																										
4. Operasional BPD	Rp. 2.000.000																										
5. Operasional RW	Rp. 2.000.000																										
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> Rp. 213.007.300,-		<table border="1"> <tr><td><b>A. Dana Desa</b></td><td>Rp. 702.291.400</td></tr> <tr><td>1. Pengisian Intaiasi Lemak &amp; Tepan</td><td>Rp. 48.000.000</td></tr> <tr><td>2. Pembangunan Drainase</td><td>Rp. 154.243.200</td></tr> <tr><td>3. Perawatan Pemukiman</td><td>Rp. 66.000.000</td></tr> <tr><td>4. Pengisian Jalan Desa</td><td>Rp. 148.214.700</td></tr> <tr><td>5. Pembangunan Dukker</td><td>Rp. 42.910.000</td></tr> <tr><td>6. Pengisian Bangunan Lantai</td><td>Rp. 81.620.000</td></tr> <tr><td>7. Pengisian Benarok Ksamar</td><td>Rp. 2.216.700</td></tr> <tr><td>8. Pengisian Akti-akt Banggai</td><td>Rp. 10.000.000</td></tr> <tr><td>9. Pengisian Perawatan &amp; Main Lantai</td><td>Rp. 53.940.000</td></tr> <tr><td><b>B. Alokasi Dana Desa</b></td><td>Rp. 842.593.000</td></tr> <tr><td>1. Pembangunan Rabat Beton</td><td>Rp. 842.593.000</td></tr> </table>		<b>A. Dana Desa</b>	Rp. 702.291.400	1. Pengisian Intaiasi Lemak & Tepan	Rp. 48.000.000	2. Pembangunan Drainase	Rp. 154.243.200	3. Perawatan Pemukiman	Rp. 66.000.000	4. Pengisian Jalan Desa	Rp. 148.214.700	5. Pembangunan Dukker	Rp. 42.910.000	6. Pengisian Bangunan Lantai	Rp. 81.620.000	7. Pengisian Benarok Ksamar	Rp. 2.216.700	8. Pengisian Akti-akt Banggai	Rp. 10.000.000	9. Pengisian Perawatan & Main Lantai	Rp. 53.940.000	<b>B. Alokasi Dana Desa</b>	Rp. 842.593.000	1. Pembangunan Rabat Beton	Rp. 842.593.000
<b>A. Dana Desa</b>	Rp. 702.291.400																										
1. Pengisian Intaiasi Lemak & Tepan	Rp. 48.000.000																										
2. Pembangunan Drainase	Rp. 154.243.200																										
3. Perawatan Pemukiman	Rp. 66.000.000																										
4. Pengisian Jalan Desa	Rp. 148.214.700																										
5. Pembangunan Dukker	Rp. 42.910.000																										
6. Pengisian Bangunan Lantai	Rp. 81.620.000																										
7. Pengisian Benarok Ksamar	Rp. 2.216.700																										
8. Pengisian Akti-akt Banggai	Rp. 10.000.000																										
9. Pengisian Perawatan & Main Lantai	Rp. 53.940.000																										
<b>B. Alokasi Dana Desa</b>	Rp. 842.593.000																										
1. Pembangunan Rabat Beton	Rp. 842.593.000																										
<table border="1"> <tr><td>1. Bantuan Insentif Kader Posyandu</td><td>Rp. 4.080.000</td></tr> <tr><td>2. Bantuan Insentif Guru TPA</td><td>Rp. 16.200.000</td></tr> <tr><td>3. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga</td><td>Rp. 32.046.000</td></tr> <tr><td>4. Bantuan Pengadaan Babi</td><td>Rp. 146.431.300</td></tr> <tr><td>5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa</td><td>Rp. 8.250.000</td></tr> <tr><td>6. Raja Temporer</td><td>Rp. 5.000.000</td></tr> </table>		1. Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp. 4.080.000	2. Bantuan Insentif Guru TPA	Rp. 16.200.000	3. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	Rp. 32.046.000	4. Bantuan Pengadaan Babi	Rp. 146.431.300	5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp. 8.250.000	6. Raja Temporer	Rp. 5.000.000	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> Rp. 5.000.000,-													
1. Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp. 4.080.000																										
2. Bantuan Insentif Guru TPA	Rp. 16.200.000																										
3. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	Rp. 32.046.000																										
4. Bantuan Pengadaan Babi	Rp. 146.431.300																										
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp. 8.250.000																										
6. Raja Temporer	Rp. 5.000.000																										
		<table border="1"> <tr><td>1. Kegiatan PKR</td><td>Rp. 3.000.000</td></tr> <tr><td>2. Kegiatan LKD</td><td>Rp. 2.000.000</td></tr> </table>		1. Kegiatan PKR	Rp. 3.000.000	2. Kegiatan LKD	Rp. 2.000.000																				
1. Kegiatan PKR	Rp. 3.000.000																										
2. Kegiatan LKD	Rp. 2.000.000																										

Foto APBDesa Tahun Anggaran 2018



Foto Pembangunan Rabat Beton



Wawancara dengan Bapak Sulaiman



Foto Bersama Masyarakat Nelayan



Foto Poskesdes Desa Sabbang Paru



Foto Pembangunan Jalan Desa

## RIWAYAT HIDUP



**Mahadir**, lahir di Sabah, pada tanggal 21 Oktober 1996.

Lahir dari pasangan bapak Muh. Thamrin dan ibu Muliana.

Anak kedua dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2002 di SDN 185 Kanipang

Kabupaten Pinrang dan selesai pada tahun 2008. Pada

tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Lembang

Kabupaten Pinrang dan selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang

sama penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pinrang

dan selesai pada tahun 2014. Tanpa menunggu waktu lama di tahun yang sama

yaitu tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di

Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Pendidikan Sosiologi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Selama di perguruan tinggi penulis pernah tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Dimulai dari tahun 2015-2016 sebagai anggota Bidang

Humas HMJ Pendidikan Sosiologi. Tahun 2016-2017 sebagai Sekretaris Umum

HMJ Pendidikan Sosiologi yang sekarang berubah nama menjadi HIMA PRODI.

Tahun 2017-2018 tergabung dalam BEM FKIP sebagai Wakil Sekretaris Umum.

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menimba ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap

dapat mengamalkan ilmu yang telah didapat dengan baik dan membahagiakan

orang tua serta berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga,

masyarakat, dan bangsa.